

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT OLEH KEPALA DESA
DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN KEPALA DESA
MENGELUARKAN SURAT PERNYATAAN FISIK BIDANG TANAH**

SKRIPSI

Oleh:

ANDREYAS TAMBUNAN

NPM : 201910115277



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa
Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa
Mengeluarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah"
Nama Mahasiswa : Andreyas Tambunan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115277
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 30 Juni 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Dr. Lusia Sulastris SH, MH.
NIDN. 0127117401

Pembimbing II

Nina Zainab SH, MH.
NIDN. 0303037904



LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa
Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa
Mengeluarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah.

Nama Mahasiswa : Andreyas Tambunan
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115277
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2024

Jakarta, 31 Juli 2024

MENGESAHKAN,

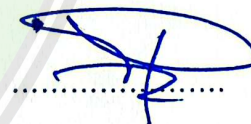
Ketua Penguji : Dr. Lukman Hakim S.H., M.H.
NIDN. 0319077606



Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN : 0312117102



Penguji II : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H
NIDN : 0127117401



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN : 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rr. Diyan Widijowati, S.H., M.H
NIDN : 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreyas Tambunan

NPM : 201910115177

TTL : Rantau Prapat, 07 Juli 1998

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mnegeluarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Andreyas Tambunan

201910115277

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreyas Tambunan
NPM : 201910115277
TTL : Rantau Prapat, 7 Juli 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mnegeluarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juni 2024

Yang memhuat pernyataan



Andreyas Tambunan

201910115277

ABSTRAK

Nama Andreyas. 201910115277. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mnegeuarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah.

Dalam skripsi ini membahas mengenai unsur-unsur pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, kemudian dihubungkan dengan kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah. Latar belakang yang digunakan adalah pemberhentian penyelidikan yang dilakukan oleh polres metro Kab. Bekasi atas laporan polisi yang atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Kepala Desa. Permasalahan yang penulis temukan adalah pernyataan kepolisian yang menyatakan bahwa tidak adanya tindak pidana dalam peristiwa penerbitan 3 sporadik atas 1 objek tanah yang dilakukan oleh Kepala Desa dan seberapa jauh dapat kepala desa dimintakan pertanggungjawaban pidana serta bagaimana bentuk perlindungan terhadap masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang kemudian juga didukung dengan pendekatan perspektif kualitatif. Penelitian deskriptif normatif yang menggunakan sumber data sekunder, berupa bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan kualitatif dengan penguraian secara deskriptif analisis dan preskriptif para ahli dan prinsip serta teori-teori hukum.

Pada kesimpulan, bahwa dimungkinkan Kepala Desa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dasar pasal 263. Karena dalam proses penerbitan sporadik, sebelumnya kepala desa harus menerbitkan surat riwayat atas tanah yang berdasarkan buku induk desa yang menyatakan bahwa dalam objek tanah yang diajukan permohonan belum ada surat atau hak tanah orang lain. Apabila kepala desa dalam menerbitkan surat keterangan riwayat tanah tanpa melakukan kroscek terlebih dulu pada buku induk desa, maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kepala desa memiliki niat buruk atas penerbitan sporadik tersebut. Kemudian, bentuk perlindungannya adalah dengan cara memaksimalkan peran pengawasan pada BPD di desa dalam penerbitan sporadik.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pertanggungjawaban Pidana, Kewenangan Kepala Desa.

ABSTRACT

Name Andreyas. 201910115277. Criminal Act of Forgery of Letter by Village Head in Relation to the Authority of Village Head to Issue Physical Statement of Land Field.

This thesis discusses the elements of the crime of mail forgery as stipulated in Article 263 of the Criminal Code, and then relates it to the authority of the Village Head in issuing a Physical Statement of Land Field. The background used is the dismissal of the investigation conducted by the Bekasi Regency Metro Police on the police report on the alleged criminal act of forgery of letters committed by the Village Head. The problem that the author finds is the police statement stating that there is no criminal offense in the issuance of 3 sporadic on 1 land object by the Village Head and how far the village head can be held criminally liable and how to protect the community so that such actions are not repeated.

The method used in writing this thesis is the normative juridical method, which is then also supported by a qualitative perspective approach. Normative descriptive research that uses secondary data sources, in the form of library materials. The data obtained will be analyzed qualitatively by descriptive analysis and prescriptive analysis of experts and legal principles and theories.

In conclusion, it is possible that the Village Head can be held criminally liable on the basis of Article 263. Because in the sporadic issuance process, previously the village head must issue a history letter on the land based on the village master book which states that in the object of the land being applied for there is no other person's land title or right. If the village head issues a land history certificate without first checking the village master book, then from this it can be seen that the village head has bad intentions for the issuance of the sporadic. Then, the form of protection is by maximizing the supervisory role of the BPD in the village in the issuance of sporadic.

Keywords: Criminal Acts of Mail Forgery, Criminal Liability, Village Head Authority.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT OLEH KEPALA DESA DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN KEPALA DESA MENGELUARKAN SURAT PERNYATAAN FISIK BIDANG TANAH”.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, dengan kerendahan hati disampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, SH, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana SH, MH., selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Jakarta Raya dan Dosen Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Lusia Sulastri SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Nina Zainab SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Rekan-rekan Mahasiswa kelas C1 dan C2, yang selama berjalannya perkuliahan telah saling mendukung.
8. Kedua orang tua serta saudara-saudara, kakak, dan adik yang selama ini telah mendukung penulis secara materil dan immateril, hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. J. Leonard Butarbutar selaku Ketua Umum LMPPSDMI yang selama ini mendukung dan memberikan masukan, saran dan informasi terkait judul skripsi ini.
10. dr. Ary selaku guru spritual yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Bekasi, 30 Juni 2024


Andreyas Tambunan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Kegunaan Teoritis	7
1.4.2. Kegunaan Praktiss	7
1.5. Kerangka Konseptual	7
1.6. Kerangka Teoritis	10
1.7. Kerangka Pemikiran	12
1.8. Penelitian Terdahulu	13
1.9. Metode Penelitian	15
1.9.1. Jenis Penelitian	16
1.9.2. Pendekatan Penelitian	16
1.9.3. Bahan Hukum	16

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data	17
1.9.5. Metode Analisis Penelitian	18
BAB II TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT	19
2.1. Hukum Pidana	19
2.2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	20
2.3. Tindak Pidana	21
2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.5. Jenis-Jenis Tindak Pidana	25
2.6. Tindak Pidana Pemalsuan	27
2.7. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan	28
2.8. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29
2.9. Teori Pertanggungjawaban Pidana	31
2.10. Teori Hukum Pertanahan	32
2.11. Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria	33
2.12. Cara Memperoleh Hak Atas Tanah	36
2.12.1. Atas Tanah Negara	36
2.12.2. Atas Tanah Hak Perorangan	37
2.12.3. Jual Beli Tanah	39
2.13. Pengertian Pendaftaran Tanah	40
2.14. Fungsi Pendaftaran Tanah	42
2.15. Tujuan Pendaftaran Tanah	42
2.16. Asas-Asas Pendaftaran Tanah	45
2.17. Kewenangan Kepala Desa	48
BAB III SISTEM PENDFTARAN TANAH DENGAN SPORADIK	50
3.1. Pendaftaran Tanah Pertama Kali Dengan Sistem Sporadik	50
3.2. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan Kepala Desa Dihubungkan Surat Riwayat Keterangan Tanah	53
3.3. Pasal Pemalsuan Surat Pada KUHP	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pertama Kali Dengan Sistem Sporadik Memiliki Potensi Tindak Pidana Pemalsuan Surat	58
4.2. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76